

OMBUDSMA SULSEL SAMPAIKAN PENGUATAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI KANWIL DITJEN IMIGRASI SULSEL

Rabu, 03 Desember 2025 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

Makassar - Ombudsman RI menegaskan bahwa integritas merupakan pilar utama dalam Reformasi Birokrasi (RB), khususnya di sektor pelayanan publik. Penekanan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, pada kegiatan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Senin (2/12/2025).

Dalam paparannya, Ismu Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah tengah memasuki fase baru RB yang mengedepankan digital governance, namun tetap menempatkan human-based governance sebagai fondasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa integritas tetap menjadi faktor paling menentukan keberhasilan RB.

"Integritas adalah reformasi yang paling sederhana untuk diucapkan, tetapi paling sulit dilaksanakan. Tanpa integritas, reformasi hanyalah seremonial," tegasnya.

Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan juga menyoroti sejumlah tantangan, antara lain kualitas layanan publik yang belum merata, potensi maladministrasi dalam proses pelayanan dan perizinan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi ASN. Pada layanan keimigrasian, penguatan transformasi digital melalui M-Paspor, autogate, biometrik, serta peningkatan kapasitas petugas dipandang sebagai fondasi utama mendukung RB jangka panjang.

"Kami mendorong layanan imigrasi yang inklusif, cepat, dan bebas maladministrasi. Layanan yang baik hanya terwujud jika integritas dijaga dan pengawasan dilakukan secara konsisten," tambah Ismu.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan Frice Sumolang, menegaskan bahwa RB merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam memperkuat tata kelola politik, hukum, dan birokrasi.

"Kegiatan internalisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berdaya saing dengan semangat core value PRIMA," ujarnya.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dan jajaran Imigrasi. Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan berharap sinergi tersebut terus berlanjut melalui implementasi nyata di lapangan, sehingga reformasi birokrasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.